**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

 Jepang merupakan negara dengan perekonomiannya yang maju dan berpengaruh besar dalam ekonomi politik internasional. Pada tahun 1970an Jepang mendominasi pasar global dengan produk elektroniknya, menjadikan Jepang pada saat itu dijuluki *“The King of The Global Electronic Industry”.* Dinamika perekonomian Jepang yang baik dan menguatnya nilai mata uang Yen menghasilkan periode *“economic miracle”,* memberi daya tarik bagi masyarakat Jepang dan internasional untuk melakukan investasi secara besar-besaran hingga mengalami gejolak pada akhir tahun 1980an yang disebut *“bubble economy”.*

Mengakibatkan kejatuhan ekonomi maupun politik yang dikenal dengan masa *“the lost decade of Japan”,* dikarenakan pemerintah Jepang berusaha memperbaiki dan mengembalikan level perekonomian sebelum terjadinya *bubble*. Usaha pemerintah mengembalikan pertumbuhan ekonomi hanya sedikit yang berhasil dan selanjutnya terhambat oleh kelesuan ekonomi global pada tahun 2000. Nilai nominal GDP tahun 2010 sebesar 475.8 triliun Yen yang hampir setara dengan pendapatan 472.3 triliun Yen di tahun 1991 ketika Jepang berada di tengah fenomena *bubble economy*[[1]](#footnote-1) , menunjukkan Jepang mengalami stagnansi. Bencana alam gempa bumi dan tsunami di tahun 2011 juga berpengaruh.

 Di akhir tahun 2012 pemerintah Jepang memiliki hutang sebesar 997 triliun Yen, yang artinya lebih dari 200% GDP Jepang. Perekonomian Jepang menghadapi risiko menurunnya prospek pertumbuhan. Faktor berkurangnya jumlah populasi yang berdampak pada penurunan produktifitas angkatan kerja sudah menjadi tantangan pemerintah Jepang. Lebih dari seperempat masyarakat Jepang berusia 65 tahun keatas, dengan persentase 26.6% di tahun 2015, melebihi Amerika Serikat dengan persentase 14.8%, Perancis 19.1%, Swedia 19.9% dan Italia 22.4%, menjadikan Jepang negara dengan masyarakatnya paling cepat tua dibandingkan negara industrialisasi lainnya terutama negara Amerika Serikat dan Eropa. Penurunan drastis angka kelahiran Jepang menunjukkan rasio tenaga kerja dan pensiun berubah dari 20:1 di tahun 1950 menjadi 3:1 di tahun 2015.[[2]](#footnote-2)

 Menurut laporan *Center For Strategic & International Studies* (CSIS), Jepang diprediksi mengalami penurunan populasi 30% dari populasi 128 juta pada tahun 2010 menurun menjadi 87 juta pada tahun 2060.[[3]](#footnote-3) Jepang telah mengalami penurunan angka kelahiran sejak tahun 2007. Di tahun 2011 total angka kelahiran sebanyak 1.39, jauh dibawah target yang diperlukan untuk menjaga level populasi Jepang, yakni 2.07.[[4]](#footnote-4) Sekitar 27% populasi Jepang adalah mereka yang berusia 65 tahun atau lebih, dan populasi usia lanjut diprediksi akan meningkat 38.8% dari populasi pada tahun 2050.[[5]](#footnote-5)

 OECD memperkirakan apabila penurunan populasi usia produktif terus terjadi, populasi tenaga kerja Jepang akan menjadi 21% dibawah yang diperlukan untuk pertumbuhan GDP sebesar 1.2%. Menghabiskan ekstra 7% dari GDP negara untuk melayani populasi usia lanjut seperti dana pensiun dan layanan kesehatan di tahun 2030.[[6]](#footnote-6)

 Penurunan populasi Jepang akan memberikan pengaruh kepada ekonomi Jepang, dimana dampak dari penurunan jumlah penduduk ini akan mengurangi angkatan kerja produktif yang akan melakukan kegiatan produksi dimana kegiatan ekonomi berlangsung. Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar secara tidak langsung akan dapat membantu dalam meningkatkan perekonomiannya. Namun dengan kondisi Jepang pada saat ini, akan menambah kekhawatiran pihak perusahaan asing akan kesempatan mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu memasarkan produk kedalam negeri Jepang itu sendiri.

 Bagi perusahaan asing, semakin kecil jumlah penduduk suatu negara jelas akan semakin memperkecil pangsa pasar yang akan mereka tuju untuk melakukan kegiatan jual beli. Perekonomian suatu negara merupakan suatu hal yang vital untuk menentukan *bargaining position* dari suatu negara di mata internasional. Dengan menurunnya perekonomian Jepang, jelas akan membuat posisi Jepang dimata dunia sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang stabil, akan segera terancam. Fenomena *aging population* serta merta menambah beban yang ditanggung oleh negara dimana angkatan kerja yang sudah tidak produktif tetap akan menjadi tanggung jawab negara dalam menjalani hari tuanya.

 Dapat dipahami bahwa tingginya angka kebutuhan atas tenaga kerja serta tingginya angka pekerja dengan umur diatas rata-rata disebabkan karena tingkat kelahiran yang rendah, kondisi lingkungan yang tidak menunjang perempuan untuk melahirkan atau membesarkan anak bagi perempuan karir Jepang. Ditambah dengan peranan perempuan di dalam semua sektor kerja sangat rendah. Perempuan belum banyak mengisi posisi-posisi penting. Persentase perempuan yang berada di dalam dunia kerja masih jauh dibandingkan dengan negara lainnya. Bahkan peranan perempuan Jepang dalam posisi pimpinan atau manajerial masih berkisar pada bilangan 9%, sangat rendah dibandingkan persentase jumlah tenaga kerja perempuan Jepang yang berkisar 40%.[[7]](#footnote-7)

 Pada tahun 2012, International Monetary Fund (IMF) merilis *working paper* dengan tajuk *“Can Women Save Japan?”, paper* tersebut mengeluarkan penelitian sejauh mana peningkatan partisipasi perempuan karir dapat membantu memperlambat tren populasi tua serta sebagai potensial pertumbuhan. Jepang diharapkan dan disarankan oleh IMF untuk mempertimbangkan kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan yang bekerja, mengurangi ketidaksetaraan posisi karir antara perempuan dan laki-laki serta menyediakan fasilitas dan dukungan untuk para ibu yang bekerja.[[8]](#footnote-8)

 Di tingkat internasional dalam mengukur keaktifan partisipasi perempuan dalam suatu negara, Jepang selalu menempati posisi terendah dalam *The* *Global Gender Gap Report* di antara negara-negara berkembang. *The Global Gender Gap Report* pertama kali diperkenalkan oleh World Economic Forum di tahun 2006 sebagai kerangka kerja untuk menangkap besarnya kesenjangan gender dan melacak kemajuan perkembangan negara. Patokan indeksnya yakni kesenjangan gender dalam ekonomi, politik, edukasi dan kesehatan dalam suatu negara, dengan memberikan peringkat antar negara setiap tahunnya yang didesain untuk menciptakan kesadaran yang luas diantara audiensi global terhadap tantangan kesenjangan gender dan menciptakan upaya untuk menguranginya.

 Jepang mengalami kemunduran setiap tahunnya dengan menempati posisi 70 di tahun 2006 turun peringkat ke posisi 104 dari 144 negara di tahun 2014.[[9]](#footnote-9) Menjadikan Jepang satu peringkat berada di bawah Armenia dan di atas Maldives. Jepang menduduki posisi terendah di bidang kesetaraan partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik yakni 102 untuk ekonomi, berada di antara negara Qatar dan Ethiopia, dan 129 untuk pemberdayaan politik, berada di antara negara Hungaria dan Bhutan. Hal ini mendapat kritikan dari Direktur International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde dalam pidatonya di Tokyo yang menyayangkan masih adanya kesenjangan gender di Jepang dan menyarankan pemerintah Jepang segera mengambil tindakan.[[10]](#footnote-10)

 Kritikan Direktur IMF Christine Lagarde kepada Jepang juga diperkuat melalui laporan dari United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (UN CEDAW) di tahun 2016 yang mencatat beberapa isu seperti perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan karir Jepang, pemecatan ilegal pegawai perempuan, pelecahan yang terjadi di lingkungan kerja.[[11]](#footnote-11)

 Perbedaan gaji dan karir serta jabatan yang jauh di antara pegawai laki-laki dan perempuan merupakan hal yang bukan baru lagi di Jepang. Budaya Jepang yang *ryosaikenbo (good wife, wise mother)*, sebuah ideologi yang membenarkan dan merasionalisasi pembagian kerja berdasarkan gender dengan cara laki-laki bekerja sementara perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak masih terjadi tidak hanya Jepang sebelum perang tetapi masyarakat Jepang pasca perang juga.[[12]](#footnote-12) Mempengaruhi perempuan Jepang yang berdampak pula dengan permasalahan rendahnya angka kelahiran di Jepang, dikarenakan perempuan Jepang mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga termasuk keinginan untuk memiliki anak dan membesarkannya, sehingga banyak perempuan Jepang memilih untuk fokus terhadap karir dan menunda kelahiran anak.

 *Stereotype* masyarakat Jepang yang dianggap seksisme dapat dilihat dari peristiwa sekretaris kabinet pemerintah Jepang Yoshihide Sugayang menuai kritik atas komentarnya untuk mendorong kembali Jepang ke era perang dimana perempuan harus memiliki anak untuk berkontribusi terhadap kepentingan negara tahun 2015 lalu.[[13]](#footnote-13) Suga bukan figur publik senior pertama Jepang yang menyarankan peran utama perempuan adalah bereproduksi. Di tahun 2007 pada pemerintahan periode pertama Perdana Menteri Shinzo Abe, Menteri Kesehatan Hakuo Yanagisawa mendeskripsikan perempuan sebagai *birth-giving machines* (mesin melahirkan anak) yang menjadi sorotan publik akan pernyataannya yang seksisme dan bias.

 Selain menyorot perhatian masyarakat domestik, krisis dan kondisi yang dihadapi Jepang juga mendapat perhatian dari media internasional. Komentar editor dan penulis kolom berita *foreign affairs* majalah Time Ian Bremmer yang menyebut Jepang sebagai Saudi Arabia di negara berkembang dalam tulisannya juga merupakan salah satu bentuk kritikan Jepang.[[14]](#footnote-14) Media internasional seperti New York Times mempertanyakan kondisi demografi Jepang dengan memberi tajuk utama berita “*Without babies, can Japan survive?*”[[15]](#footnote-15), begitu juga media Fox News dengan “*Lack of Babies Could Mean the Extinction of the Japanese People?”.*[[16]](#footnote-16)

 Ditambah dengan *comfort women[[17]](#footnote-17)* yang disebutkan dalam laporan UN CEDAW mengkritik tindakan Jepang melakukan penulisan ulang fakta sejarah *comfort women* yang dihilangkan didalam kurikulum pendidikan nasional Jepang.[[18]](#footnote-18)

 Jepang dalam upayanya menangani perjanjian terhadap negara korban *comfort women* seperti Korea Selatan, menawarkan permintaan maaf dan donasi 1 milyar Yen terhadap korban Korea Selatan di tahun 2011 sebagai penyelesaian secara hukum dan politis terhadap isu yang sudah berlangsung 70 tahun tersebut. Namun penawaran maaf Jepang terhadap Korea Selatan dikritik oleh ketua International Center for Transitional Justice David Tolbert karena penawaran maaf Jepang merupakan dorongan Amerika Serikat yang dimotivasi bukan untuk mengembalikan keadilan terhadap korban *comfort women* melainkan untuk mengurangi tensi antara Jepang dan Korea termasuk perselisihan teritorial dan geopolitik.[[19]](#footnote-19)

 Jepang dianggap gagal dalam memenuhi kriteria yang diatur dalam norma internasional hak asasi manusia bahwa permohonan maaf harus adanya fakta dan penerimaan tanggung jawab, karena Jepang menawarkan penawaran dan penyesalan dikarenakan hanya atas keterlibatan wewenang militer Jepang dalam perbudakan seksual perempuan di Korea Selatan.[[20]](#footnote-20) Reputasi Jepang mendapat sorotan negatif dari komunitas internasional dan menambah tekanan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam keseluruhan.

 Selama satu dekade pemerintahan Jepang sudah berusaha mengatasi permasalahan demografi dengan memfokuskan berbagai program yang dapat meningkatkan angka kelahiran. Seperti insentif pajak dan kampanye untuk mendorong pasangan memiliki anak lebih banyak. Di tahun 1997, untuk pertama kalinya dalam sejarah Jepang, Perdana Menteri Hashimoto Ryutaro mengumumkan kesetaraan gender sebagai salah satu pilar utama reformasi sosietal dan politik.[[21]](#footnote-21)

 Di tahun 2010, periode pertama kepemimpinan Shinzo Abe, Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang merilis kampanye *Ikumen* dan merevisi kebijakan cuti orang tua untuk mendorong ayah turut serta mengambil cuti. *Ikumen* artinya laki-laki yang berperan aktif dalam membesarkan anak (*ikuji*). Tujuan kampanye tersebut mengubah kebiasaan ayah dan pembagian kerja rumah tangga.

 Pada pemerintahan Perdana Menteri Koizumi pula dibentuk untuk pertama kalinya Menteri Kesetaraan Gender dan Isu Sosial di Jepang yang sampai sekarang masih bertahan. Selama pemerintahan Koizumi, komite didirikan didalam kebijakan perdana menteri, didedikasikan untuk menangani tugas mempelajari dunia kerja yang seimbang bagi keluarga.[[22]](#footnote-22) Namun usaha-usaha sebelumnya ini belum memberikan progres yang begitu berarti berdasarkan fakta bahwa Jepang semakin mengalami krisis demografi dan rendahnya kesetaraan partisipasi perempuan Jepang.

 Shinzo Abe merupakan perdana menteri Jepang pertama yang mengkhususkan keterlibatan perempuan dan mentargetkan tenaga kerja perempuan sebagai bagian dari strategi reformasi struktural ekonomi nasional dan pemulihan krisis demografi Jepang serta menjadikannya kebijakan baik nasional dan internasional.[[23]](#footnote-23)

 Semenjak menduduki kursi Perdana Menteri pada Desember tahun 2012 Abe telah mendorong agenda pertumbuhan ekonomi dan reformasi yang dikenal sebagai Abenomics, sebuah sistem perekonomian Jepang berdasarkan gagasan-gagasan Shinzo Abe. Dengan tajuk utama “*Japan is Back*” (Jepang telah Kembali), Abenomics fokus terhadap apa yang kemudian disebut *“three arrows*” atau tiga program yakni (1) *fiscal stimulus* (stimulus fiskal) (2) *monetary easing* (pelonggaran moneter) dan (3) *structural reform* (reformasi struktural).[[24]](#footnote-24)

 Reformasi strukturalmenjadi strategi baru yang diterapkan beberapa negara seperti Cina, Brazil, negara-negara Eropa, Afrika Selatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan kebijakan pemerintah, atau dengan kata lain merubah cara pemerintah bekerja tergantung dengan permasalahan yang terjadi di setiap negara. Tipe kebijakan *structural reforms* berdasarkan European Commision salah satunya melibatkan tantangan *population ageing,* fenomena sama yang dialami Jepang.

 Sebagai bagian dari *structural reforms* Abenomics, Abe mengadopsi dan mengimplementasi konsep Womenomics yang pertama kali diciptakan oleh Kathy Matsui melalui paper nya yang berjudul Womenomics: Female buy the Female Economy pada tahun 1999. Dengan janji memajukan perempuan Jepang agar dapat ‘bersinar’, pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe ingin memberi kontribusi yang lebih baik dalam bidang ekonomi dan mencapai posisi *leadership* baik dalam ekonomi dan politik yang kemudian menjadi sorotan publik dan pengamat akademisi.

 Konsep dasar kebijakan Womenomics adalah mendorong partisipasi perempuan dan memajukan peran perempuan Jepang kedalam dunia kerja dibidang ekonomi dan politik yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan mendukung serta penerimaan masyarakat dengan Womenomics. Kebijakan Womenomics selain strategi ekonomi Jepang juga merupakan tuntutan Jepang untuk melipat gandakan usahanya dalam mendukung kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan bagian dari pembangunan demokrasi ekonomi dan kesetaraan gender berada di tengah-tengah sosial.

 Perdana Menteri Shinzo Abe dengan inisiatifnya yang disalurkan melalui Gender Equality Bureau under Cabinet Office memformulasikan tujuan pencapaian Womenomics sebagai sebuah kebijakan transformasi masyarakat yang responsif gender. Program kebijakan tersebut tertuang dalam *Act concerning Promotion of Women's Career Activities (PWCA)* yaitu undang-undang tentang pengembangan kesempatan perempuan untuk berkarir yang disetujui oleh National Diet pada 28 Agustus 2015, dan pemberian sanksi akan diberlakukan terhitung 1 April 2016.[[25]](#footnote-25)

 *“Create society where woman shine”* adalah slogan yang dikeluarkan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melalui pidatonya di hadapan Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada September 2013 lalu.[[26]](#footnote-26) Selain permasalahan domestik Jepang yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula kekhawatiran Jepang akan reputasinya di komunitas internasional sebagai sebuah resiko dalam investasi dan lamban dalam kesetaraan gender juga merupakan faktor yang membantu dalam memahami waktu dan platform kebijakan Womenomics Abe.

 Para akademisi telah mendokumentasikan peran tekanan internasional *(gaiatsu)* di posisi Jepang mengenai kesetaraan perempuan dan isu perempuan. Salah satu contohnya, penelitian Chan-Tiberghien yang menunjukan bagaimana tekanan internasional pernah menghasilkan penyertaan cakupan pil KB di Jepang pada tahun 1999, lima tahun setelah Jepang dikritik untuk tidak memiliki ketentuan tersebut ketika berpartisipasi di UN International Conference on Population and Development di tahun 1994.

 Menurut Linda Hasunuma, strategi ekonomi tentang perempuan Jepang juga menjadi strategi hubungan luar negeri yang dapat membantu Jepang membentuk ulang kerangka naratif dan reputasinya sebagai negara yang gagal mendorong kesetaraan gender terutama perempuan, yang dihadapkan dengan meningkatnya kritik dan penghukuman dari aktivis perempuan dan hak asasi manusia.

 Dalam pidatonya di forum internasional Global Leaders Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment 2015, Abe mereferensikan pentingnya mendukung kesetaraan gender dan kesempatan ekonomi terhadap perempuan di negara berkembang, serta mempromosikan Jepang sebagai negara inisiasi kebijakan berbasis gender seperti Womenomics.

 Ministry of Foreign Affairs (MoFA) dan federasi bisnis Jepang yakni Keidanren juga terlibat dalam membantu pemerintah Jepang menjadi tuan rumah konferensi World Assembly for Women (WAW), melibatkan pemimpin *high-profile* perempuan di bidang bisnis dan politik dari seluruh negara-negara. Menunjukkan bisnis besar dan kepentingan internasional yang dicari Jepang untuk mempromosikan *image* Jepang. MoFA, dan Keidanren juga memiliki program yang sama mengenai tenaga kerja perempuan dan pertumbuhan ekonomi, mencerminkan agenda dari kebijakan Womenomics. Peningkatan sektor pertumbuhan dan perekonomian berbasis perempuan atau yang disebut kebijakan Womenomics adalah upaya yang diterapkan demi kesejahteraan ekonomi, sosial dan peningkatan peran perempuan dalam pencapaian kesetaraan gender di Jepang. Sehingga berdasarkan latar belakang penelitian ini penulis mengambil judul penelitian **“Kebijakan Womenomics: Strategi Reformasi Struktural Ekonomi dan Pemulihan Krisis Demografi Sebagai Respon Terhadap Kritik IMF.”**

.

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan terkait kebijakan Womenomics sebagai respon dalam permasalahan kritik internasional mengenai kesenjangan gender yang terjadi di Jepang, penulis menarik beberapa pertanyaan sebagai identifikasi masalah, yaitu:

 1. Sejauh mana kritik internasional terhadap kesetaraan gender di Jepang?

 2. Mengapa kebijakan Womenomics dianggap dapat menjadi strategi identitas Jepang?

 3. Bagaimana implementasi kebijakan Womenomics sebagai strategi reformasi struktural ekonomi dan pemulihan demografi di Jepang?

**C. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan terkait kebijakan Womenomics dalam mendorong kesetaraan gender di Jepang, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan tema dengan berfokus terhadap pengaruh kebijakan Womenomics dalam meningkatkan kesetaraan dan partisipasi perempuan Jepang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu pemulihan krisis demografi Jepang, sebagai respon terhadap tekanan internasional dari IMF.

**D. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yakni **“Bagaimana kebijakan Womenomics dapat menjadi identitas Jepang di dunia internasional?”**

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

 **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai:

 1. Mengetahui kritik kesetaraan gender internasional di Jepang.

 2. Mengetahui kebijakan Womenomics sebagai strategi identitas Jepang.

 3. Mengetahui implementasi kebijakan Womenomics.

 **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagai sarana belajar dalam mengintegrasikan pengetahuan, menjadi acuan bagi akademik yang bermanfaat teoritis dan manfaat praktis dari hasil penelitian.

1. Kato Hisazaku, “The Japanese Economy Amid Aging and Declining Population and Fiscal Deficits” Japan Policy Forum (Online), 30 Januari 2012, dalam http://www.japanpolicyforum.jp/archives/economy/pt20120130124136.html, diakses pada tanggal 6 September 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Helen Macnaughtan, “Womenomics for Japan: is the Abe policy for gendered employment viable in an era of precarity?” dalam The Asia-Pacific Journal, Vol. 13, No. 1 (Mar 30, 2015). [↑](#footnote-ref-2)
3. CSIS. 2017. “Womenomics: Progress Made and Challenges Remaining”. Materi disajikan dalam Diskusi Panel CSIS, Washington 27 Februari. [↑](#footnote-ref-3)
4. “Japan’s depopulation time bomb”, dalam http://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/04/17/editorials/japans-depopulation-time-bomb/#.WYqckITRuRs, diakes pada tanggal 9 Agustus 2017 [↑](#footnote-ref-4)
5. Friedman, Abigail. 2016. “Boosting Japan’s Workforce (and Womenomics) through Immigration*”.* CSIS (online), dalam https://www.csis.org/analysis/boosting-japans-workforce-and-womenomics-through-immigration, diakses pada tanggal 9 Agustus 2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. CSIS. 2017. “Womenomics: Progress Made and Challenges Remaining”. Materi disajikan dalam Diskusi Panel CSIS, Washington 27 Februari. [↑](#footnote-ref-6)
7. “Still a struggle for working women”, dalam Japan Times (Online), diakses melalui https://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/04/08/editorials/still-a-struggle-for-working-women/#.WvUp2ITRtPM, diakses pada tanggal 8 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. . IMF, Can Women Save Japan? (IMF Working Paper, 2012). [↑](#footnote-ref-8)
9. World Economic Forum. 2014. The Global Gender Gap Report. Switzerland: World Economic Forum’s Publication. [↑](#footnote-ref-9)
10. Christine Lagarde, *The Economic Power of Women’s Empowerment* dalam https://www.imf.org/external/np/speeches/2014/091214.htm), diakses pada tanggal 26 September 2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. “Japan’s record on women’s rights to face review by UN Committee*”,* dalam UN Human Rights Report,dalam http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17028&LangID=E, diakses pada tanggal 26 September 2017. [↑](#footnote-ref-11)
12. Koyama, Shizko. 2014. “Ryosai Kenbo: The Educational Ideal of ‘Good Wife, Wise Mother’”. *Modern Japan (The Intimate and the Public in Asian and Global Perspectives).* Educational Studies in Japan: International Yearbook. Hlm. 159-161. [↑](#footnote-ref-12)
13. “Japanese politician in sexism row after call for women to have more babies”, The Guardian (Online), dalam https://www.theguardian.com/world/2015/sep/30/japanese-politician-yoshihide-suga-in-sexism-row-after-call-for-women-to-have-more-babies, diakses melalui diakses pada tanggal 26 September 2017. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ian Bremmer, “Japan’s Secret Demographic Weapon,” Project Syndicate (Online), October 2, 2012, dalam https://www.project-syndicate.org/commentary/how-women-s-equality-can-save-japan-by-ian-bremmer-and-susan-schwab, diakses pada tanggal 3 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-14)
15. Alexandra Harney, “Without Babies, Can Japan Survive?” New York Times (Online), December 15 2012, dalam http://www.nytimes.com/2012/12/16/opinion/sunday/without-babies-can-japan-survive.html, diakses pada tanggal 26 September 2017. [↑](#footnote-ref-15)
16. David Piper, “Lack of Babies Could Mean the Extinction of the Japanese People”, Fox News (Online), May 11 2012, dalam http://www.foxnews.com/world/2012/05/11/lack-babies-could-mean-extinction-japanese-people.html, diakses pada tanggal 28 September 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Comfort Women* merupakan istilah bagi 200.000 perempuan di Asia yang dipaksa bekerja sebagai prostitusi atau budak seksual bagi tentara Jepang selama Perang Dunia II. [↑](#footnote-ref-17)
18. “*Japan to review UN recommendation on comfort women issue”*, Arirang News (Online), dalam https://www.youtube.com/watch?v=NQBGm-3E9WU diakses pada tanggal 3 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-18)
19. David Tolbert, “Japan’s Apology to South Korea Shows What Public Apologies Should (Not) Do”, Huffington Post (Online), dalam https://www.huffingtonpost.com/david-tolbert/japans-apology-to-south-k\_b\_9111566.html diakses pada tanggal 3 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
21. Chan-Tiberghien, Jennifer. 2004. *Gender and Human Rights Politics in Japan: Global Norms and Domestic Network*. Standford: University Press. Hlm. 2 [↑](#footnote-ref-21)
22. Linda Hasunuma, “Political Targets: Womenomics as an Economic and Foreign Relations Strategy”, Asie.Visions, No. 92, Ifri, April 2017. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
24. “Abenomics” dalam https://www.japan.go.jp/abenomics/about/, diakses pada tanggal 1 September 2017. [↑](#footnote-ref-24)
25. “The Act on Promotion of Women’s Participation and Advancement in the Workplace”, dalam http://www.gender.go.jp/english\_contents/about\_danjo/lbp/pdf/promotion\_of\_woman.pdf, diakses pada tanggal 3 November 2017. [↑](#footnote-ref-25)
26. *“*Adress by Prime Minister Shinzo Abe, at The Sixty-Eight Session of The General Assembly of The United Nations*”* dalam pidato Perdana Menteri Abe Shinzo, 26 September, 2013, dalam https://japan.kantei.go.jp/96\_abe/statement/201309/26generaldebate\_e.html diakses pada tanggal 9 Agustus 2017. [↑](#footnote-ref-26)